

PERUBAHAN NILAI RUANG KAWASAN WISATA BOROBUDUR

Nur Adi Kusno

Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada
adikusno@gmail.com

ABSTRAK. Kawasan Wisata Borobudur mempunyai nilai sangat tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia dan dunia sehingga dianugerahi predikat *World Cultural Heritage*. Kebijakan pengelolaan kawasan Borobudur dipandang belum mampu secara utuh menata dan mengelola perkembangan yang meningkat pesat. Pesatnya pertumbuhan kawasan membentuk perubahan-perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan ruang. Hal tersebut ditunjukkan dengan fenomena terpinggirnya masyarakat oleh desakan arus modal yang menggerus dan menghanyutkan budaya setempat diperkuat dengan perubahan dinamika politik dan pemerintahan pasca tahun 1998. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan nilai ruang yang terbangun di dalam Kawasan Wisata Borobudur. Penelitian ini dilakukan di 14 desa dalam Kawasan Strategis Nasional Borobudur yang mempunyai aktifitas pariwisata yang berkaitan dengan Candi Borobudur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis induktif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang menekankan pada pemahaman kondisi penelitian yang mendalam terhadap munculnya perubahan nilai ruang pada Kawasan Wisata Borobudur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan nilai ruang pada kawasan wisata Borobudur dengan merujuk terhadap konsep terbentuknya ruang kesenjangan pada kawasan inti serta ruang keterlibatan dan keterbukaan pada kawasan wisata baru.

Kata Kunci: *Perubahan; Nilai Ruang; Borobudur; Fenomenologi*

PENDAHULUAN

Kawasan Wisata Borobudur mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dan dapat dijadikan pusat studi tentang sejarah kehidupan masa lampau dari bangsa Indonesia. Budaya dan tata kehidupan yang sangat maju pada masanya telah menjadikan Candi Borobudur sebagai *World Cultural Heritage*. Berbagai kebijakan pengelolaan kawasan Borobudur yang telah disusun oleh pemerintah bertujuan agar menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan dengan pariwisata sebagai tulang punggungnya. Pesatnya pertumbuhan wilayah membentuk perubahan-perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan ruangnya. Interaksi masyarakat dengan sesama ataupun dengan lingkungan berubah seiring dengan kemajuan wilayah.

Salah satu aspek yang jarang disentuh dalam pengelolaan kawasan Candi Borobudur adalah tentang penataan kawasannya. Sejarah penataan kawasan Candi Borobudur dimulai dari studi yang dilaksanakan oleh JICA pada tahun 1979 sebagai komplemen atau pendukung pelaksanaan pemugaran secara fisik yang dilaksanakan oleh UNESCO dan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut oleh pemerintah diadopsi menjadi Keppres No.1 tahun 1992 yang mengatur kewenangan pengelolaan kawasan candi berdasarkan peruntukan dan lembaganya. Menggunakan peta zonasi hasil studi JICA tahun 1979, pemerintah membagi zona 1 dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur untuk pengembangan studi arkeologi, sedangkan zona 2 dikelola oleh BUMN PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan zona 3 dikelola oleh Pemerintah daerah setempat. Kawasan Borobudur yang dibagi menjadi 5 Zona oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1979 dimaksudkan untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, candi-candi maupun situs-situs lainnya. Kebijakan pengelolaan terbaru kawasan Borobudur adalah diterbitkannya Perpres No. 58 tahun 2014 tentang Kawasan Strategis Nasional Borobudur Dan Sekitarnya.

Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian adalah terpinggirnya masyarakat oleh desakan arus modal yang gencar menggerus dan menghanyutkan budaya setempat mengikuti arus baru yang masuk. Alasan utama yang diduga menjadi penyebab utama kondisi tersebut terbentuk adalah komersialisasi kawasan pariwisata. Hal lain yang turut membentuk fenomena perubahan dalam kawasan wisata Borobudur adalah dinamika politik dan pemerintahan pasca tahun 1998, hal tersebut turut membentuk fenomena yang sekarang berkembang di kawasan wisata Borobudur. Usaha restorasi dan pengelolaan Borobudur yang dilaksanakan pada era orde Baru dengan orde Reformasi

(pasca 1998) memberikan sebuah dimensi pengelolaan serta penerimaan masyarakat sekitar Borobudur yang berbeda.

Nilai ruang adalah nilai yang menggambarkan hubungan yang kongruen/sebangun antara aktivitas manusia, tatanan fisik ruang dan tatanan sosial (Lawson,2001). Sehingga dapat dipahami bahwa nilai ruang terbentuk dari aktivitas multi-dimensi dan melibatkan multi-subyek yang merupakan produk budaya manusia dalam aktivitas pemanfaatan ruang untuk menunjang kehidupannya. Dinamika kehidupan manusia merupakan hal yang menjadi salah satu pemicu perubahan ruang, perubahan sosial, ekonomi maupun teknologi membawa pengaruh yang signifikan terhadap ruang. Morril (1974) berpendapat dinamika ruang tidak hanya dipengaruhi oleh karakter fisiknya saja, namun pola pikir, budaya serta persepsi masyarakat terhadap cara memanfaatkan dan menggunakan ruang membawa sebuah konsekuensi terhadap perubahan ruang. Secara sederhana hal tersebut menunjukkan kekuatan non fisik manusia baik secara individu maupun dalam kelompok yang berupa sistem nilai sosial dan budaya memberikan perubahan terhadap ruang.

Hal tersebut menunjukkan perubahan ruang tidak berlangsung secara spontan dan menyeluruh. Perubahan cara pandang, pola pikir serta persepsi masyarakat sebagai bentuk interaksi antara manusia dan ruang yang kemudian disebut sebagai nilai merupakan salah satu unsur yang berperan besar dalam perubahan ruang. Perubahan nilai ruang merupakan hasil dari sebuah proses interaksi manusia dengan ruang dengan berbagai elemen yang melandasinya. Studi yang bertujuan menggali perubahan nilai ruang Kawasan Borobudur menjadi sebuah hal yang menarik dan penting apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat di dalam Kawasan Wisata Borobudur selanjutnya.

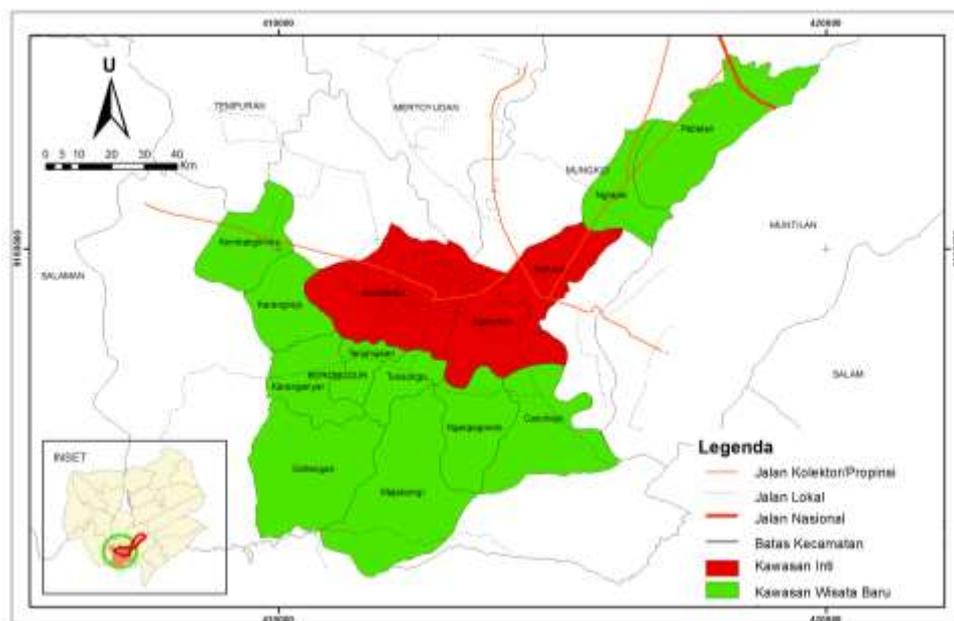
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah induktif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dibahas pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis data primer yang bersumber dari wawancara dan pengamatan langsung menjadi hal yang utama serta data sekunder lain sebagai pelengkap.

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yang menjelaskan fenomena sosial dan data informasi secara terperinci guna menggambarkan hasil pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Singarimbun, 1995). Proses analisis data kualitatif meliputi empat tahap yaitu Reduksi, Kategorisasi, Sistesisasi dan menjawab pertanyaan penelitian (Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian fenomenologi perubahan nilai ruang kawasan wisata Borobudur ini mengungkap adanya temuan menarik yaitu terbentuknya 2 kawasan apabila dikaitkan dengan nilai ruang yang terbangun dalam masyarakat sebagaimana dalam Gambar 1. Dimana kawasan inti dengan ruang kesenjangan dan kawasan wisata baru dengan ruang keterbukaan dan keterlibatan.



Gambar 1. Perubahan Ruang Kawasan Wisata Borobudur

Ruang Kesenjangan

Kawasan Borobudur merupakan kawasan yang mempunyai daya jual yang tinggi di bidang pariwisata, dengan berbagai predikat yang disandangnya menjadikan kawasan ini memikat dan menarik minat untuk mengunjunginya. Kawasan Borobudur adalah kawasan yang unik apabila dipandang dari fungsi awal dan kondisinya saat ini, Borobudur bukan saja menjadi peninggalan peradaban semata namun juga disucikan oleh pemeluk agama Buddha. Menjadi tempat suci peribadatan umat Buddha dengan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas memeluk agama lain merupakan hal yang menjadi keunikannya.

Keberadaan bangunan candi dengan fungsinya ternyata dimaklumi dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar secara turun temurun, hal tersebut dikuatkan dengan penerimaan masyarakat selama ini terhadap pemeluk agama Buddha yang melakukan peribadatan. Kondisi tersebut dalam perkembangannya menemui beberapa hal yang mengusik masyarakat setempat, antara lain dengan gagasan wisata religi yang diusung oleh pemerintah untuk meningkatkan predikat Borobudur sebagai destinasi wisata unggulan. Masyarakat belum mendapatkan gambaran yang lengkap atas ide ini yang membuat kekhawatiran serta rasa semakin terpinggirkan. Selain itu penolakan juga terjadi atas ijin pendirian tempat-tempat peribadatan dengan simbol-simbol keagamaan yang dipandang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Masyarakat merasa keberadaan tempat peribadatan yang telah ada dipandang mencukupi kebutuhan akan tempat ibadah. Kesenjangan religi semakin menguat dengan interpretasi masyarakat bahwa ide pembangunan tempat peribadatan tersebut hanya sebagai bentuk eksistensi sekelompok umat secara ekonomi bukan kebutuhan ibadah.

Kawasan Borobudur dengan Candi Borobudur sebagai peninggalan budaya peradaban masa lampau yang megah tentu saja memiliki kebudayaan lokal yang berkembang di masyarakat. namun seiring dengan perkembangan jaman seni budaya tersebut ternyata perlahan tertutup dengan seni yang modern. Keberadaan Borobudur yang mempunyai nama besar dan daya tarik yang kuat mengundang kesenian serta seniman di luar kawasan Borobudur memanfaatkannya untuk meningkatkan gengsi karyanya serta menjadi etalase yang tepat. Fenomena tersebut memiliki perbedaan dengan rencana pendirian tempat peribadatan walaupun pada awal perolehan lahannya memiliki sedikit kemiripan yaitu melalui calo tanah atau penghubung lokal, masyarakat secara awam memandang bahwa pendirian galeri seni tersebut hal yang biasa dan tidak menimbulkan permasalahan. Lain halnya dengan tokoh pemerhati seni dan budaya yang mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat mematikan seniman lokal yang tidak memiliki kemampuan dana dan jaringan yang mumpuni.

Perubahan simbol-simbol budaya lain yang terjadi di kawasan Borobudur ditunjukkan dengan maraknya pagelaran kesenian modern di Borobudur yang semakin mengikis dan menutup

kesempatan budaya kesenian lokal untuk tampil dan dikenal oleh masyarakat luas. Hadirnya pagelaran seni modern hanya dipandang memanfaatkan nama besar dari Borobudur semata dengan harga tiket yang mahal serta target pengunjung khusus kalangan tertentu. Masyarakat Borobudur sebagai tuan rumah hanya sebagai pelengkap saja, mahalnya tiket serta budaya yang tidak sesuai membentuk sebuah kesenjangan.

Kesenjangan yang terjadi di kawasan Borobudur bukan hanya di segi religi dan kebudayaan, kesenjangan yang paling mudah ditemui adalah kesenjangan di bidang ekonomi. Hal tersebut tidak lepas dari berdatangannya investor bidang pariwisata dari luar kawasan yang tertarik dengan Borobudur. Kedatangan investor dengan sokongan modal besar dan dalam bentuk jaringan semakin meminggirkan masyarakat setempat dengan modal kecil dan terbatas. Pelaku usaha lokal terjepit dan dihadapkan dalam kondisi yang sulit dalam persaingan penyediaan jasa pariwisata, hal tersebut menjadikan masyarakat lokal bersaing dengan sesama pemodal kecil dengan pangsa pasar sisa para pemodal besar. Kesenjangan yang terjadi merupakan dampak dari tidak adanya konsep pemberdayaan dan proteksi terhadap pelaku jasa pariwisata lokal yang ada. Hal tersebut menjadikan masyarakat setempat tidak memiliki kawasan Borobudur secara ekonomi namun tercabut akses ekonomi dan menjadi penonton keramaian bisnis pariwisata yang ada.

Ruang Keterlibatan dan Keterbukaan

Kawasan wisata Borobudur mengalami perkembangan yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan kawasan lain yang berada di sekitarnya. Candi Borobudur sebagai pusat perkembangan dengan tingginya kunjungan pariwisata tiap tahunnya. Seiring dengan semakin meningkatnya kunjungan pariwisata maka usaha-usaha pendukung kepariwisataan semakin ramai dan bersaing.

Kawasan wisata Borobudur berpusat di daerah sekitar candi yaitu di Desa Borobudur, Mendut dan Wanurejo yang kemudian berkembang dengan pesat. Perkembangan kawasan yang paling menonjol adalah terbangunnya fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata di daerah tersebut. Fasilitas pendukung pariwisata tersebut mengisi ruang-ruang di kawasan inti untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atas pelayanan pariwisata. Fasilitas penginapan, rumah makan, persewaan kendaraan merupakan hal yang mudah untuk ditemui di daerah tersebut.

Usaha pendukung pariwisata di kawasan inti Borobudur merupakan gambaran bagaimana kuatnya daya tarik kawasan tersebut apabila dilihat dari segi perekonomian. Bisnis jasa pariwisata merupakan hal yang utama di kawasan inti Borobudur dengan berbagai variasi pelayanan yang ditawarkan. Masyarakat setempat dan investor dari luar bersaing dengan ketat di bidang pariwisata. Investor dari luar kawasan dengan kekuatan modal dan jaringan yang telah terbangun tentu saja lebih diuntungkan dibandingkan dengan pelaku pariwisata lokal.

Perkembangan pariwisata di kawasan Borobudur tidak hanya terjadi di kawasan inti namun juga telah melebar ke desa-desa yang lain dengan berbagai potensi yang dimiliki. Perkembangan kawasan wisata Borobudur tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sekitar, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena munculnya obyek-obyek wisata yang baru di luar kawasan inti. Munculnya fenomena tersebut didasari dengan keinginan untuk ikut memanfaatkan potensi pengunjung kawasan inti Borobudur. Obyek-obyek pariwisata maupun konsep pariwisata yang ditawarkan dikelola oleh warga dengan berbagai metode yang digunakan, ada daerah yang telah mengelola secara serius dan formal namun ada juga yang dikelola secara sederhana. Hal tersebut menunjukkan kuatnya keinginan masyarakat di luar kawasan inti untuk setidaknya menikmati keuntungan sektor pariwisata yang selama ini hanya berkutat di kawasan inti Candi Borobudur.

Modal keterlibatan masyarakat tersebut dilengkapi dengan keterbukaan masyarakat setempat kepada investor jasa pariwisata yang masuk di daerahnya. Keterbukaan tersebut dibarengi dengan usaha pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pelaku pariwisata dalam usaha pariwisatanya. Pelibatan masyarakat tersebut dilakukan sedemikian rupa untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap usaha pariwisata yang dijalankan.

Faktor Pendukung Perubahan Nilai Ruang Kawasan

Perubahan nilai ruang di kawasan Borobudur yang terjadi pasca bergulirnya Orde Reformasi tentu saja didukung dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang teridentifikasi di masing-masing kawasan tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Faktor Pendukung Perubahan Nilai Ruang

Kawasan	Faktor Pembentuk Nilai Kemenduaan
Kawasan Wisata Inti	Kekecewaan masyarakat yang terelokasi pada tahap pemugaran membentuk sikap apatis terhadap program pemerintah
	Tidak adanya konsep pemberdayaan serta perlindungan masyarakat terhadap pemodal dari luar kawasan
	Rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesenian lokal
	Kurangnya sosialisasi konsep pengembangan kawasan yang digagas oleh pemerintah.
Kawasan Wisata Baru	Potensi wisata yang menarik untuk dikemas
	Keinginan menikmati nilai ekonomi pariwisata Borobudur
	Pengelolaan wisata yang dilakukan secara mandiri

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan terkait perubahan nilai ruang kawasan wisata Borobudur adalah terbangun 2 konsep perubahan nilai ruang yaitu ruang kesenjangan, serta ruang keterlibatan dan keterbukaan. Konsep ruang kesenjangan pada kawasan inti Borobudur didukung oleh beberapa faktor yaitu ; sikap apatis masyarakat sebagai bentuk kekecewaan relokasi pada tahap pemugaran , tidak adanya konsep pemberdayaan dan perlindungan terhadap pemodal luar, rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesenian lokal dan kurangnya sosialisasi tentang konsep pengembangan kawasan. Sedangkan konsep ruang keterlibatan dan keterbukaan pada kawasan wisata baru Borobudur didukung oleh beberapa faktor yaitu ; potensi wisata yang menarik untuk dikemas, keinginan menikmati nilai ekonomi pariwisata Borobudur, pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara mandiri.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisa antara lain pengelolaan kawasan Borobudur perlu melibatkan pemerintah daerah setempat serta yang utama dengan masyarakat, kegagalan berbagai rencana pengembangan kawasan selama ini disebabkan oleh proses perencanaan yang terpusat tanpa melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat sebagai subyek perencanaan. Pembentukan forum koordinasi antara masyarakat, pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Borobudur yang diharapkan mampu menyerap permasalahan serta menemukan pemecahan masalah secara lokal.

Sedangkan di segi peraturan diperlukan konsep perlindungan kawasan secara holistik bukan hanya perlindungan secara fisik namun aspek sosial budaya dan perekonomian pun harus ikut tercakup di dalamnya. Dan tidak kalah penting adalah terbangunnya kesadaran serta niat baik dari seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan pariwisata di kawasan Borobudur agar ikut melestarikan kawasan tersebut secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi. Jakarta; PT. Pustaka LP3ES.
- Lawson, Bryan.2001. *The Language of Space*. London;Architectural Press.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morril, R. 1974. *The Spatial Organization of Society*, Second Edition. California: Duxbury Press.